

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019-2024**



**DINAS PETERNAKAN KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2021**

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2019-2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 55 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 maka Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 telah mengalami perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004); ✓

8. Peraturan...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 075, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);
9. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0595); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0595); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 036); diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dari ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2...

- (1) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002).
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penjabaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
 - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (4) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri dari:
 - a. Lampiran I : Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Lampiran II : Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
 - c. Lampiran III : Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Lampiran IV : Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - e. Lampiran V : Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Lampiran VI : Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Lampiran VII : Rencana Strategis Dinas Sosial;
 - h. Lampiran VIII : Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - i. Lampiran IX : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

j. Lampiran IX...

j. Lampiran X	: Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan;
k. Lampiran XI	: Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
l. Lampiran XII	: Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
m. Lampiran XIII	: Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
n. Lampiran XIV	: Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
o. Lampiran XV	: Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
p. Lampiran XVI	: Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
q. Lampiran XVII	: Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
r. Lampiran XVIII	: Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
s. Lampiran XIX	: Rencana Strategis Dinas Perikanan;
t. Lampiran XX	: Rencana Strategis Dinas Pertanian;
u. Lampiran XXI	: Rencana Strategis Dinas Peternakan;
v. Lampiran XXII	: Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
w. Lampiran XXII.1	: Rencana Strategis Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
x. Lampiran XXII.2	: Rencana Strategis Bagian Hukum;
y. Lampiran XXII.3	: Rencana Strategis Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
z. Lampiran XXII.4	: Rencana Strategis Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
aa. Lampiran XXII.5	: Rencana Strategis Bagian Organisasi;
bb. Lampiran XXII.6	: Rencana Strategis Bagian Umum;
cc. Lampiran XXIII	: Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
dd. Lampiran XXIV	: Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
ee. Lampiran XXV	: Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah;
ff. Lampiran XXVI	: Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah;
gg. Lampiran XXVII	: Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
hh. Lampiran XXVIII	: Rencana Strategis Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia;
ii. Lampiran XXIX	: Rencana Strategis Inspektorat; ✓

jj. Lampiran XXX...

- jj. Lampiran XXX : Rencana Strategis Kecamatan Lobalain;
- kk. Lampiran XXXI : Rencana Strategis Kecamatan Rote Barat Laut;
- ll. Lampiran XXXII : Rencana Strategis Kecamatan Rote Barat Daya;
- mm. Lampiran XXXIII : Rencana Strategis Kecamatan Rote Barat;
- nn. Lampiran XXXIV : Rencana Strategis Kecamatan Rote Selatan;
- oo. Lampiran XXXV : Rencana Strategis Kecamatan Rote Tengah;
- pp. Lampiran XXXVI : Rencana Strategis Kecamatan Pantai Baru;
- qq. Lampiran XXXVII : Rencana Strategis Kecamatan Rote Timur;
- rr. Lampiran XXXVIII : Rencana Strategis Kecamatan Ndao Nuse;
- ss. Lampiran XXXIX : Rencana Strategis Kecamatan Landu Leko;
- tt. Lampiran XXXX : Rencana Strategis Kecamatan Loaholu; dan
- uu. Lampiran XXXXI : Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

(5) Uraian lebih lanjut sistematisa Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

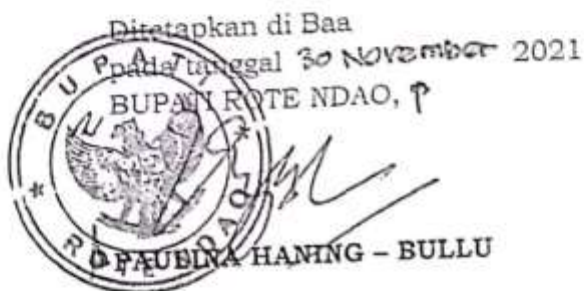
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Mengesahkan

Salinan sesuai aslinya
KEPADA BAKOSURTABAL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

HANGNY M. J. MOOY, SH, M.Si
NIP. 19841606 201101 1 012



Diundangkan di Ba'a
pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021 NOMOR 055

KATA PENGANTAR

Perencanaan sebagai salah satu unsur manajemen dalam rangka menggerakkan dan mengarahkan seluruh elemen suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, memiliki peran penting untuk keberhasilan organisasi tersebut. Perencanaan strategis sebagai salah satu bentuk perencanaan sangat dibutuhkan dalam setiap organisasi, termasuk lembaga public pemerintah sekalipun. Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategis (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang), implementasi dan evaluasi serta pengendalian. Sebagaimana diketahui, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, yang disusun berdasarkan manfaat yang diinginkan dimasa depan. Proses analisis, perumusan dan evaluasi strategi-strategi untuk mencapai tujuan, yang disusun berdasarkan manfaat yang diinginkan dimasa depan. Proses analisis, perumusan dan evaluasi strategi-strategi untuk mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada disebut sebagai perencanaan strategis. Dengan demikian, tujuan utama perencanaan strategis adalah agar suatu organisasi dapat melihat secara obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal organisasi sehingga dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal.

Pelaksanaan tugas pokok dan sesuai ketentuan peraturan (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010), Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao wajib menyusun perencanaan jangka menengah dalam bentuk Rancangan Rencana Strategis (Renstra). Rancangan Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan (Tahun 2019-2024) yang berisikan arahan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan, serta indicator kinerja, rencana indikatif pendanaan dan unit kerja pelaksana. Renstra disusun berdasarkan analisis strategis terhadap kondisi lingkungan internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Dokumen ini berfungsi sebagai arahan dan pedoman bagi seluruh jajaran aparat di lingkungan Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao maupun para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya dalam pelaksanaan pembangunan peternakan Kabupaten Rote Ndao periode 2019-2024.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 ini telah melibatkan berbagai pihak, baik dari internal maupun eksternal Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao. Untuk itu patut disampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas masukan pikiran, dukungan sumberdaya serta partisipasinya dalam proses penyusunan Renstra ini.

Demikian semoga Perubahan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dalam rangka pencapaian visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan peternakan dan kesehatan hewan kabupaten Rote Ndao kedepan

Baa, 30 November 2021
Kepala Dinas Peternakan



Hermanus Haning, S.Pt

Pembina Tk I/ IV b

Nip. 19770720 200003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
.....	10
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya OPD	10
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan.....	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
.....	25
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	25
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	28
3.5 Penentuan Isu Strategis	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	32
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	32
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
peternakan, dan perikanan	33
Kebijakan Pemanfaatan Iptek	33`
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	35
6.1 Progran dan Kegiatan.....	35
BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD	47
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	47
BAB VIII PENUTUP	48

RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019-2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan, tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja, tetapi juga kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen perencanaan Pembangunan Lima Tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang mempedomani RPJMD, sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019- 2024 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Namun dalam pelaksanaannya Rencana Strategis dimaksud mengalami perubahan disebabkan adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 pada perubahan indikator sasaran, target sasaran, program, dan lokasi. Sesuai ketentuan peraturan-perundangan pelaksanaan perubahan RPJMD dilakukan secara simultan dengan perubahan Renstra Perangkat Daerah, hal ini dikarenakan sasaran Renstra Perangkat Daerah merupakan pendorong tercapainya target sasaran RPJMD serta program RPJMD bersumber dari program pada Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, pertimbangan lain perubahan Renstra berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah dan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dalam rangka perbaikan tujuan, sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah.

Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu meliputi:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Penyusunan Rancangan Akhir; dan
5. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode perencanaan lima tahun. Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.
15. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 064);

16. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 54 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.
17. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 072).
18. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerinta Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 065).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Peternakan Kab. Rote Ndao adalah untuk melakukan penyesuaian indikator tujuan dan sasaran sesuai Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor..... Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra

Perubahan Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah agar dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
- c. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Renja Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

(Memuat secara ringkas pengertian Renstra penyusunan Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, Proses Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD)

1.2 Landasan Hukum

(Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah)

1.3 Maksud dan Tujuan

(Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah)

1.4 Sistematika Penulisan

(Memuat tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen)

BAB II GAMBARAN PELAYAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

(Memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme)

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

(Memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

(Memuat tentang tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

(Memuat tentang tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam periode renstra 2019 – 2024)

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

(Memuat tentang permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan peternakan)

3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

(Memuat tentang visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih)

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

(Memuat telaahan renstra K/L dan renstra Dinas Peternakan)

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

(Memuat tentang RT/RW dan kajian lingkungan hidup strategis)

3.5 Penentuan Isu Isu Strategis

(Memuat tentang isu – isu strategis dalam pengembangan bidang Peternakan)

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

(Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan dalam pengembangan bidang peternakan)

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

(Memuat tentang Strategi pengembangan inovasi untuk peningkatan produksi dan produktifitas hasil pertanian, peternakan, dan perikanan serta kebijakan pemanfaatan Iptek)

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

(Memuat tentang rencana program, kegiatan dan pendanaan)

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

(Memuat tentang indikator kinerja SKPD dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD)

BAB VII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016, tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

- Melaksanakan sebagian urusan pemerintah di bidang Peternakan
- Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah di bidang peternakan

2. Fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis bidang peternakan;
- Pelaksanaan kebijakan bidang peternakan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peternakan;
- Pelaksanaan administrasi dinas dibidang peternakan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksanaan Otonomi Daerah dibidang Peternakan yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab pada Bupati melalui sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Peternakan di bantu oleh 1 (satu) orang sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 15 (dua Belas) Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPTD masing-masing dengan rumusan tugas sebagai berikut :

1. Sekretaris :

Tugas Pokok sekretaris adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi program, data dan evaluasi keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar. Sekretariat terdiri dari ;

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan dan Aset
- Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2. Bidang Prasarana dan Sarana

Tugas Pokok Bidang Prasarana dan Saran adalah merencanakan operasional pembinaan dan pengendalian sarana prasarana pengembangan sumber daya peternakan meliputi lahan dan irigasi, pakan, pembiayaan dan investasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan produksi peternakan.

Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari :

- a. Seksi Lahan dan Irigasi;
- b. Seksi Pakan; dan
- c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.

3. Bidang Perbibitan dan Produksi

Tugas Pokok Bidang perbibitan dan produksi adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbibitan dan produksi ternak ruminansia dan non ruminansia sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Bidang perbibitan dan Produksi, terdiri dari :

- a. Seksi perbibitan;
- b. Seksi ruminansia; dan
- c. Seksi non ruminansia.

4. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Tugas pokok bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner meliputi pelayanan kesehatan hewan dan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta kesehatan masyarakat veteriner berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pengamanan ternak, produksi ternak dan kesehatan masyarakat veteriner. Bidang kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Hewan dan Obat;
- b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
- c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

5. Bidang Agribisnis Peternakan dan Penyuluhan

Tugas pokok bidang Agribisnis Peternakan dan Penyuluhan adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan agribisnis peternakan dan penyuluhan meliputi kelembagaan usaha peternakan, pelayanan usaha peternakan, kemitraan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan penyuluhan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan sistem dan usaha agribisnis peternakan. Bidang Agribisnis Peternakan dan Penyuluhan, terdiri dari :

- a. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- b. Seksi Pelayanan Usaha dan Perijinan Peternakan; dan
- c. Seksi Penyuluhan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

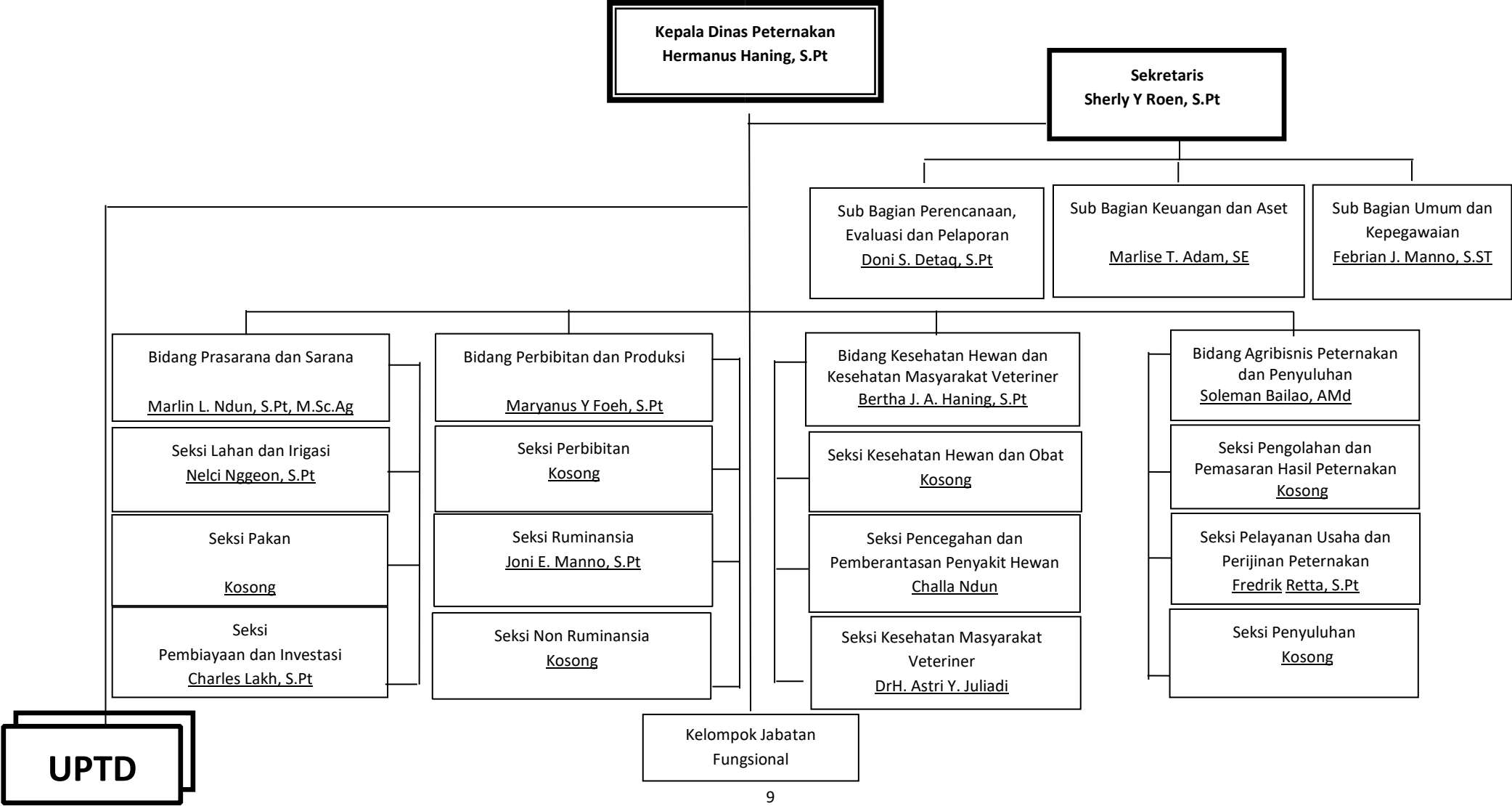
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

UPTD adalah unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang tertentu, dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepala Dinas.

Adapun struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah :

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN



2.2 Sumber Daya OPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM aparatur pemerintah pada Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao keadaan Juni 2021 adalah sebagai berikut :

- 1. Pengawai Negeri Sipil Daerah : 56 Orang
- 2. Jumlah PNS dirinci menurut tingkat pendidikan :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Pasca Sarjana	1 Orang	
2	Sarjana	40 Orang	
3	Diploma	3 Orang	
4	SMTA	11 Orang	
5	SMTP	1 Orang	
Jumlah		56 Orang	

- 3. Jumlah SDM aparatur pemerintah pada Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao yang telah mengikuti diklat PIM keadaan Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	PIM II	-	
2	PIM III	3 Orang	
3	PIM IV	3 Orang	
Jumlah		6 Orang	

- 4. Jumlah PNS dirinci menurut Golongan :

No	Tingkat Golongan	Jumlah	Ket
1	Golongan IV / d	-	
2	Golongan IV / c	-	
3	Golongan IV / b	1 Orang	
4	Golongan IV / a	2 Orang	
5	Golongan III / d	9 Orang	
6	Golongan III / c	5 Orang	
7	Golongan III / b	13 Orang	
8	Golongan III / a	11 Orang	
9	Golongan II / d	9 Orang	
10	Golongan II / c	-	
11	Golongan II / b	3 Orang	
12	Golongan II / a	3 Orang	
13	Golongan I/d	-	
14	Golongan I/c	-	
15	Golongan I/b	-	
16	Golongan I/a	-	

4. Jumlah PNS dirinci menurut jabatan :

No	Jabatan	Jumlah	Ket
1	Struktural	15 Orang	
2	Fungsional	41 Orang	
Jumlah		56 Orang	

5. Jumlah PNS di r`inci menurut unit kerja :

No	Unit Kerja	Jumlah	Ket
1	Dinas Peternakan	45 Orang	
2	Resort Peternakan Kecamatan	11 Orang	
Jumlah		56 Orang	

2.2.2. Gambaran Aset PD Dinas Peternakan.

Selain Sumber Daya Manusia, Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao memiliki sumber daya lahan dan sarana prasarana yang digunakan untuk mendukung pelayanan tugas pokok dan fungsi. Lahan lokasi perkantoran meliputi tiga bidang, yang terletak di jalan Lekunik Kompleks Perkantoran (Kantor Dinas Peternakan), di Desa Sanggoen (Laboratorium Kesehatan Hewan), Desa Maubesi, Kec. Rote Tengah (RPH Ternak Besar). Terdapat 9 unit Poskeswan di 9 (sembilan) kecamatan selain kecamatan Ndao Nuse dan TPH di Kecamatan Rote Barat Laut 1 unit, Lobalain 1 unit (TPH Babi), di Kecamatan Rote Selatan 1 unit.

Gambaran Aset PD Dinas Peternakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Data Aset Dinas Peternakan Keadaan Desember tahun 2022

DATA ASET DINAS PETERNAKAN				
NO	JENIS BARANG	SATUAN	JUMLAH	KEADAAN BARANG (B/KB/RB)
1	Gedung dan bangunan	Unit	59	21 Baik, 21 Rusak ringan, 17 Rusak Berat
2	Kendaraan roda dua (2)	Unit	15	13 Baik, 1 Rusak ringan, 1 Rusak Berat
3	Kendaraan roda empat (4)	Unit	2	1 Baik, 1 Tenggelam
4	Tanah	Bidang	2	2 Baik
5	Lemari	Buah	10	2 Baik, 3 Rusak ringan, 5 Rusak Berat
6	Ac	Unit	2	1 Baik, 1 Rusak Berat
7	Embung	Unit	6	6 Baik
8	Tower	Buah	1	1 Baik
9	Instalasi listrik	Unit	5	5 Baik
10	Container / N2 Cair	Buah	4	4 Baik
11	Instalasi Jaringan air bersih	Unit	3	3 Baik
12	Kursi	Buah	21	21 Baik
13	Meja	Buah	12	12 Baik
14	Laptop	Unit	10	10 Baik
15	Komputer / PC	Unit	10	10 Baik

DATA ASET DINAS PETERNAKAN				
NO	JENIS BARANG	SATUAN	JUMLAH	KEADAAN BARANG (B/KB/RB)
16	Meja Komputer	Buah	3	3 Baik
17	Mesin Ketik	Unit	13	1 Baik, 12 Rusak Berat
18	Refrigator / Kulkas	Buah	6	6 Baik
19	Freezer	Buah	6	6 Baik
20	Kamera	Buah	1	1 Baik
21	Handy Cam	Buah	2	2 Baik
22	Layar Proyektor	Buah	1	1 Baik
23	Infokus	Unit	1	1 Baik
24	Generator / genset	Unit	1	1 Baik
25	Timbangan	Buah	4	4 Baik
26	Brand Kas	Buah	1	1 Baik
27	Tongkat Ukur	Buah	1	1 Baik
28	UPS	Unit	2	2 Baik
29	Wireless	Buah	1	1 Baik
30	Scanner	Unit	1	1 Baik
31	Faximille	Buah	1	1 Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan

Kinerja pelayanan Dinas Peternakan mendeskripsikan perbandingan antara target dan realisasi pencapaian berbagai indikator kinerja selama lima tahun terakhir (2014 - 2019) sebagaimana ditetapkan dalam Renstra / Rencana Kerja periode sebelumnya. Kinerja dalam hal ini menyangkut 2 (dua) hal utama, yakni kinerja teknis dan kinerja anggaran.

Kinerja teknis meliputi 1). Populasi ternak sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan unggas; 2) Pemotongan ternak sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan babi; 3) pengeluaran ternak potong antar pulau (sapi, kerbau, kuda, kambing/domba dan unggas); 4) Peningkatan produksi dan Produktivitas Ternak; 5) Penurunan Angka Kematian Ternak; 6) Peningkatan Pengetahuan dan ketrampilan Petani peternak (Penerapan teknologi dan manajemen beternak); dan 7) Peningkatan Minat dan kemampuan Usaha.

Kinerja pelayanan Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir relative menunjukkan kecenderungan positif. Pelaksanaan kegiatan Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao selama periode 2014 - 2019 antara lain :

1. Peningkatan Produksi dan produktivitas Ternak
 - Peningkatan Produksi Ternak : 10,15 %
 - Peningkatan Produktivitas : 9 % per tahun
2. Peningkatan Penurunan angka kematian ternak (menjadi 5 %)
3. Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Petani Peternak : 10 %
(penerapan Teknologi dan manajemen beternak)
4. Peningkatan Minat dan Kemampuan Usaha : 5 % (kelompok Usaha)

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran / target Renstra PD periode sebelumnya, berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan
Kabupaten Rote Ndao

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Ratio Capaian pada Tahun Ke-				
					15	16	17	18	19	15	16	17	18	19	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak		2400 ekor		2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan Hasil Produksi Ternak		2400 ekor		2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	100%	100%	100%	100%	100%
3	Peeningkatan Pemasaran hasil Produksi Peternakan		4 Produk		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%
4	Peningkatan Penerapan teknologi Peternakan		500 ekor		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata rata Pertumbuhan	
	15	16	17	18	19	15	16	17	18	19	15	16	17	18	19	Angga ran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
Pendapatan	150,000,000	173,000,000	223,000,000	223,000,000	223,000,000	201,226,000	222,164,500	161,850,000	162,123,500	-	134	128	73	73		0.44	-0.17
Pendapatan Asli Daerah	150,000,000	173,000,000	223,000,000	223,000,000	223,000,000	201,226,000	222,164,500	161,850,000	162,123,500	-	134	128	73	73		0.44	-0.17
Hasil retribusi Daerah	147,000,000	170,000,000	220,000,000	220,000,000	220,000,000	198,826,000	221,714,500	161,850,000	162,123,500	-	135	130	74	74		0.45	-0.15
Retribusi Jasa Usaha	147,000,000	170,000,000	220,000,000	220,000,000	220,000,000	198,826,000	221,714,500	161,850,000	162,123,500	-	135	130	74	74		0.45	-0.15
Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum di Potong	127,900,000	153,350,000	199,950,000	199,950,000	199,950,000	183,756,000	202,544,500	141,430,000	128,768,500		144	132	71	64		0.50	-0.29
Retribusi Rumah Potong Hewan	17,600,000	11,100,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	13,345,000	14,145,000	15,360,000	27,305,000	-	76	127	110	195		-0.11	0.92
Ternak Besar	12,600,000	9,100,000	11,025,000	11,025,000	11,025,000	10,920,000	11,445,000	12,385,000	21,455,000		87	126	112	195		-0.07	0.86
Ternak Kecil	5,000,000	2,000,000	2,975,000	2,975,000	2,975,000	2,425,000	2,700,000	2,975,000	5,850,000		49	135	100	197		-0.11	1.18
Retribusi Pelayanan Inseminasi Buatan	1,500,000	5,550,000	6,050,000	6,050,000	6,050,000	1,725,000	5,025,000	5,060,000	6,050,000	-	115	91	84	100		2.79	2.12
Pemeriksaan Reproduksi			1,375,000	1,375,000	1,375,000			1,150,000	1,375,000				84	100			0.20
Strow											115	91	84	100		2.44	1.80

	1,000,000	3,700,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000	1,150,000	3,350,000	2,300,000	2,750,000								
Pemeriksaan Kebuntingan	500,000	1,850,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	575,000	1,675,000	1,150,000	1,375,000		115	91	84	100		2.44	1.80
Recording			550,000	550,000	550,000			460,000	550,000				84	100			0.20
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,400,000	450,000	-	-	-	80	15	0	0		0.00	-1.81
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,400,000	450,000	-	-	-	80	15	0	0		0.00	-1.81
Penjualan Hasil Peternakan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,400,000	450,000	-	-	-	80	15	0	0		0.00	-1.81
Bagi Hasil Penggemukan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,400,000	450,000	-	-		80	15	0	0		0.00	-1.81
BELANJA DAERAH	3,965,224,750	4,778,807,046	4,843,309,530	4,838,793,822	4,776,822,000	3,937,735,909	4,433,440,227	4,565,346,678	3,600,494,990	-	99	93	94	74		0.06	-0.31
Belanja Tidak Langsung	2,402,307,700	2,885,889,800	2,926,549,280	3,366,971,822	-	389,124,422	557,199,336	676,655,515	2,429,555,293	-	99	89	91	72		0.12	-0.23
Belanja Pegawai	2,402,307,700	2,885,889,800	2,926,549,280	3,366,971,822	-	2,389,124,422	2,557,199,336	2,676,655,515	2,429,555,293	-	99	89	91	72		0.12	-0.23
Gaji dan Tunjangan	2,241,207,700	2,716,089,800	2,741,449,280	3,051,971,822		2,228,033,372	2,405,370,586	2,517,140,515	2,252,627,793	-	99	89	92	74		0.08	-0.23
Gaji Pokok	1,699,128,077	2,087,683,000	2,045,618,855	2,314,887,330		1,690,160,120	1,859,036,520	1,966,921,680	1,738,700,080		99	89	96	75		0.09	-0.21
Tunjangan Keluarga	159,282,679	222,630,875	226,756,615	289,761,868		158,035,904	157,016,224	166,825,938	166,447,158		99	71	74	57		0.44	-0.20
Tunjangan Jabatan Struktural	155,148,300	156,903,125	195,845,000	189,548,125		153,825,000	153,825,000	184,925,000	157,015,000		99	98	94	83		-0.02	-0.20

Tunjangan Fungsional Umum	73,125,000	80,016,625	78,130,000	85,033,000		72,480,000	74,800,000	68,585,000	68,140,000		99	93	88	80		-0.09	-0.31
Tunjangan Beras	118,827,416	124,511,808	149,400,060	147,371,955		118,045,280	117,899,760	121,738,020	105,226,260		99	95	81	71		-0.02	-0.35
Tunjangan PPh	35,647,811	44,211,327	45,595,162	6,552,524		35,454,069	42,759,610	8,116,616	3,403,681		99	97	18	52		-0.83	-1.43
Pembulatan Gaji	48,417	133,040	103,588	233,580		32,999	33,472	28,261	26,629		68	25	27	11		2.53	-0.45
Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				18,583,440					13,668,985					74		-0.25	-0.25
Tambahan Penghasilan/Uang Makan	161,100,000	169,800,000	185,100,000	315,000,000		161,091,050	151,828,750	159,515,000	176,927,500		100	89	86	56		0.60	-0.15
Belanja Langsung	1,562,917,050	1,892,917,246	1,916,760,250	1,471,822,000	1,776,822,000	1,548,611,487	1,876,240,891	1,888,691,163	1,170,939,697	0	2,264	2,640	2,426	2,029	0	-11.52	-22.36
Program pelayanan Administrasi Perkantoran	530,613,050	587,543,246	408,820,250	495,822,000	499,822,000	523,254,978	584,374,412	395,261,583	372,650,674	0	1,071	1,174	1,229	1,033	0	-1.25	-6.94
Penyediaan Jasa surat menyurat	2,999,250	2,999,250	2,750,000	2,000,000	2,000,000	2,996,500	2,999,000	2,730,000	1,485,000	0	100	100	99	74	0	-0.36	-0.79
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	39,800,000	46,139,996	38,650,000	30,000,000	36,000,000	36,806,228	44,641,840	26,501,500	17,586,974		92	97	69	59		-0.18	-0.78
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2,600,000	2,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	2,137,000	2,420,000	2,392,000	1,870,000		82	93	66	52		0.38	-0.35
Penyediaan jasa administrasi keuangan	75,000,000	68,520,000	59,000,000	59,000,000	59,000,000	75,000,000	68,520,000	58,970,000	40,598,000		100	100	100	69		-0.23	-0.79
Penyediaan jasa kebersihan kantor	4,000,000	4,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	4,000,000	4,000,000	3,000,000	3,000,000		100	100	100	100		-0.25	-0.50
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4,000,000	4,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	4,000,000	4,000,000	3,000,000	3,000,000		100	100	100	100		-0.25	-0.50
Penyediaan alat tulis kantor	19,896,000	16,000,000	9,949,250	15,062,000	15,812,000	19,896,000	16,000,000	9,949,000	15,062,000		100	100	100	100		-0.05	-0.31
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	113,314,800	89,000,000	42,401,000	40,000,000	40,000,000	113,310,000	88,998,750	42,399,100	33,380,500		100	100	100	83		-0.79	-1.20

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	16,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	16,000,000	8,000,000	8,000,000		0	0	100	100		-0.50	-0.75
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundangundangan	3,000,000	3,000,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,083,000	2,535,000	2,055,000	1,565,000		0	85	95	72		-0.28	-0.46
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	79,050,000	169,511,000	118,000,000	150,000,000	150,000,000	76,836,650	168,521,822	117,979,983	110,359,200		97	99	100	74		1.11	0.58
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	96,953,000	95,773,000	73,650,000	120,000,000	120,000,000	96,203,000	95,746,000	73,645,000	93,742,000		99	100	100	78		0.39	-0.21
Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah propinsi NTT	90,000,000	70,000,000	44,660,000	60,000,000	57,250,000	89,986,600	69,992,000	44,640,000	43,002,000		100	100	100	72		-0.25	-0.87
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	44,975,000	40,000,000	43,000,000	57,000,000	280,000,000	44,968,950	39,938,125	42,943,000	48,945,000	0	100	100	100	184	0	0.00	-0.66
Pengadaan Instalasi Air, Listrik, Telepon dan LAN	0		8,000,000	7,000,000	5,000,000			8,000,000	7,000,000		0	0	0	100		-0.20	-0.38
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	44,975,000	40,000,000	35,000,000	50,000,000	50,000,000	44,968,950	39,938,125	34,943,000	41,945,000		100	100	100	84		0.19	-0.29
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor					225,000,000											0.00	0.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,363,000	72,055,000	45,000,000	0	10,000,000	100,293,150	71,980,250	44,959,000	0	0	0	100	100	0	0	-2.37	-2.36
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	37,055,000					37,050,250				0	0	0	0		-1.00	-1.00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	100,363,000	35,000,000	45,000,000		10,000,000	100,293,150	34,930,000	44,959,000			0	100	100	0		-1.37	-1.36
Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	308,392,000	525,403,000	338,000,000	314,000,000	386,000,000	305,404,209	519,419,954	335,849,030	259,336,990	0	197	393	99	83	0	-1.99	-2.54
Pendataan Masalah Peternakan	0	15,000,000					15,000,000				0	0	0	0		-1.00	-1.00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata rata Pertumbuhan	
	15	16	17	18	19	15	16	17	18	19	15	16	17	18	19	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	149,767,000	253,380,000	338,000,000	314,000,000	386,000,000	149,340,800	253,319,688	335,849,030	259,336,990		100	100	99	83		1.01	0.54
Pemusnahan Ternak Yang Terjangkit Penyakit Endemik	0	10,000,000					9,999,336				0	0	0	0		-1.00	-1.00
Pengadaan sarana dan prasarana operasional laboratorium Kesehatan Hewan	50,000,000	75,000,000				48,135,000	74,999,930				0	100	0	0		-0.50	-0.44
Pembangunan/pemeliharaan tempat pemotongan hewan	25,000,000	89,063,000				24,328,471	83,223,000				97	93	0	0		1.56	1.42
Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Hewan	37,625,000	72,960,000				37,599,938	72,878,000				0	100	0	0		-0.06	-0.06
Pengadaan Alat Kedokteran Hewan	46,000,000					46,000,000					0	0	0	0		-1.00	-1.00
Pengawasan Perdagangan Vaksin dan Obat Ternak	0	10,000,000					10,000,000				0	0	0	0		-1.00	-1.00
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	291,000,000	421,639,000	732,600,000	370,000,000	361,000,000	288,007,000	421,624,350	728,853,950	293,479,233	0	198	200	299	236	0	-0.56	-1.58
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	0	170,340,000	375,000,000	120,000,000	120,000,000		170,336,000	372,047,000	66,117,969		0	0	99	55		0.52	0.11
Pembelian dan pendistribusian Vaksin dan pakan ternak	146,000,000	136,170,000	235,000,000	100,000,000	100,000,000	143,493,000	136,169,450	234,206,950	86,834,164		98	100	100	87		0.08	-0.21
Pengembangan Kebun HMT Sistem pagar Hidup	80,000,000	70,129,000	122,600,000	150,000,000	141,000,000	79,914,000	70,129,000	122,600,000	140,527,100		100	100	100	94		0.83	0.52
Sensus Ternak	65,000,000	0	0	0	0	64,600,000	0	0			0	0	0	0		-1.00	-1.00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata rata Pertumbuhan	
	15	16	17	18	19	15	16	17	18	19	15	16	17	18	19	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
Operasi Penertiban, Pemeliharaan dan Pemilikan Ternak (OP3T)	0	45,000,000	0	0	0	0	44,989,900	0			0	0	0	0		-1.00	-1.00
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	112,475,000	111,277,000	202,700,000	135,000,000	135,000,000	112,224,000	108,399,000	194,310,400	121,078,800	0	299	291	299	275	0	-3.27	-4.48
Pengolahan Informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	19,298,000	20,000,000	15,000,000	20,000,000	20,000,000	19,157,000	19,917,900	15,000,000	15,100,000		99	100	100	76		0.12	-0.45
Pengolahan Hasil Produksi Ternak	15,000,000	0	0	0	25,000,000	15,000,000	0	0			0	0	0	0		-1.00	-1.00
Pameran produksi, Industri dan pangan lokal peternakan	34,120,000	32,220,000	20,000,000	25,000,000	25,000,000	34,120,000	29,725,000	19,746,600	24,983,800		100	92	99	100		-0.18	-0.45
PEDA/PENAS kelompok tani nelayan andalan	0	0	130,000,000	0		0	0	121,923,800			0	0	0	0		-1.00	-1.00
Kontes ternak	44,057,000	44,057,000	37,700,000	40,000,000	40,000,000	43,947,000	43,756,100	37,640,000	39,995,000		100	99	100	100		-0.08	-0.33
Pengolahan hasil ternak dan pakan	0	15,000,000	0	50,000,000	25,000,000	0	15,000,000	0	41,000,000		0	0	0	0		-1.13	-1.25
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	175,099,000	135,000,000	146,640,000	100,000,000	105,000,000	174,459,200	130,504,800	146,514,200	75,449,000	0	398	382	300	219	0	-2.08	-3.80
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	36,254,000	40,000,000	43,750,000	20,000,000	20,000,000	36,252,400	39,965,800	43,750,000	16,990,000		100	100	100	85		-0.35	-0.66
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	45,000,000	30,000,000	22,300,000	20,000,000	25,000,000	44,971,800	29,978,000	22,300,000	15,000,000		100	100	100	75		-0.63	-1.17

Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna	25,030,000	25,000,000	0	20,000,000	20,000,000	25,030,000	20,725,000	0	20,000,000		0	83	0	0		-1.00	-1.42
Inseminasi Ternak	28,815,000	40,000,000	80,590,000	40,000,000	40,000,000	28,715,000	39,836,000	80,464,200	23,459,000		100	100	100	59		0.90	0.45
Pembangunan Instalasi Ternak	40,000,000	0	0	0	0	39,490,000	0	0			99					-1.00	-1.00

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao terdapat beberapa tantangan dan peluang yang di hadapi sebagai berikut :

A. Tantangan

Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengembangan peternakan di Kabupaten Rote Ndao adalah :

1. Produktifitas ternak tidak dapat mengimbangi laju kenaikan permintaan akibat pertambahan penduduk yang berdampak pada meningkatnya konsumsi daging, telur dan susu serta hasil olahannya;
2. Tingginya pemotongan ternak betina produktif dan bahkan sebagian besar yang dipotong dalam keadaan bunting;
3. Sistim pemeliharaan yang semi intensif serta skala usaha peternakan yang belum ekonomis sehingga tidak mampu memberikan tambahan pendapatan yang memadai;
4. Tingkat penggunaan sarana produksi peternakan belum efesien dan efektif dalam upaya peningkatan produktifitas ternak;
5. Rendahnya dukungan lembaga keuangan yang menyebabkan usaha peternakan maupun peternakan rakyat kekurangan modal untuk mendorong percepatan pertumbuhannya;
6. Merebaknya penyakit hewan menular strategis yang bersifat endemis maupun aksotis akibat lalu lintas ternak/hewan yang tidak dapat diawasi sepenuhnya;
7. Ketersediaan pakan didaerah sentra produksi tidak kontinyu sepanjang tahun yang berpengaruh signifikan terhadap produktifitas ternak;
8. Relatif rendahnya kompetensi dan jumlah tenaga professional dan tenaga teknis lapangan;
9. Relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia peternak dan pelaku usaha bidang peternakan.

B. Peluang

Peluang-peluang dalam pengembangan peternakan dikabupaten Rote Ndao

1. Produktifitas ternak belum dapat mengimbangi laju kenaikan permintaan akibat gaya hidup/kesadaran masyarakat akan pangan bergizi dan pertambahan penduduk yang berdampak pada meningkatnya konsumsi daging oleh masyarakat;
Pengembangan ternak sapi potong di Indonesia masih terbuka sangat lebar karena gap antara suplay dengan kebutuhan sangat besar, dari sisi produksi cenderung stagnan atau melambat yang pada akhirnya memaksa Indonesia harus impor dalam bentuk sapi bakalan, daging dan jeroan. Keadaan ini secara lambat laun mengakibatkan Indonesia sangat tergantung kepada suplai bersumber impor dan suatu saat akan terjadi keadaan dimana struktur pasar daging sapi dapat diintervensi oleh harga daging impor

2. Adanya program/kebijakan pemerintah Pusat tentang Upaya Khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau (UPSUS SIWAB) dan pemerintah Propinsi (NTT Propinsi Ternak). Program peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting tahun 2018 yang meliputi : 1). Menyediakan semen beku; 2). Meningkatkan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia petugas teknis reproduksi ternak; 3). Meningkatkan pelayanan IB; 4). Menjamin ketersediaan semen beku, N2 Cair dan container ke lokasi distribusi (propinsi/Kabupaten/Kota); 5). Meningkatkan produksi hijauan pakan ternak; 6). Melaksanakan identifikasi dan penanggulangan gangguan reproduksi; 7). Menyelamatkan akseptor (betina produktif) dari pemotongan di RPH dalam rangka mendukung UPSUS SIWAB; 8). Menyediakan standar prosedur baku pelaporan kegiatan teknis UPSUS SIWAB; 9). Mengukur capaian kinerja pelaksanaan kegiatan UPSUS SIWAB secara periodic dan berjenjang.

Dalam rangka memulihkan NTT sebagai gudang ternak, dalam hal ini pemerintah daerah berkomitmen untuk lebih mengembangkan komoditas unggulan peternakan sebagai salah satu kekuatan utama penggerak aktivitas perekonomian masyarakat. Kebijakan dan aturan hukum berupa tekad dan agenda pembangunan ekonomi tersebut merupakan peluang yang sangat baik bagi masyarakat dan perlu dimanfaatkan oleh segenap komponen masyarakat dan pemerintah dalam rangka pengembangan agribisnis peternakan daerah Kabupaten Rote Ndao

3. Kondisi agroklimat (iklim semi arid) relatif lebih cocok sebagai kawasan peternakan. Sebagian besar daerah Rote Ndao merupakan wilayah bertipe iklim agak kering sampai kering (6 sampai 9 bulan kering) serta didominasi oleh lahan kering yang berimplikasi pada pendeknya periode untuk melakukan kegiatan bercocoktanam tanaman pangan. Berdasarkan kondisi tersebut maka kebijakan pembangunan pertanian perlu diarahkan pada subsector yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif, memiliki kesesuaian dengan kondisi sumberdaya lahan dan iklim serta berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak (memiliki keterkaitan kedepan dan ke belakang), yakni salah satunya adalah pengembangan subsector peternakan.
4. Adanya dukungan regulasi yang kuat (UU otonomi Daerah dan UU peternakan dan keswan).

Menurut penjelasan Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan secara sendiri maupun terintegrasi dengan budidaya tanaman pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan; dengan pendekatan system agribisnis peternakan dan sistem kesehatan hewan; serta penerapan asas kemanfaatan dan berkelanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan dan keprofesionalan. Kedua hal tersebut harus diselenggarakan secara

- sinergis untuk melindungi dan meningkatkan kualitas sumberdaya hewan; menyediakan pangan yang aman sehat, utuh, dan halal;
5. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan, dan lingkungan; menyediakan jasa dan bahan baku industri mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; meningkatkan pendapatan dan devisa Negara; memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja; serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 6. Tersedianya dana dari berbagai sumber untuk pemberdayaan masyarakat kecil secara langsung serta fasilitas kredit perbankan.

Tingginya perhatian pemerintah terhadap upaya peningkatan pendapatan masyarakat kecil (petani) dan penanggulangan kemiskinan tercermin dari penyediaan dana dari berbagai sumber dan jenis /program untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Penyediaan dana tersebut bertujuan antara lain untuk penguatan modal petani atau kelompok tani. Permodalan merupakan salah satu faktor produksi pertanian yang penting, selain tenaga kerja untuk memanfaatkannya, namun jika tidak tersedia modal untuk pengadaan teknologi dan membiayai kegiatan-kegiatan agribisnis, maka keberadaan sumberdaya tersebut masih bersifat potensial saja. Sebagai suatu bagian dari sistem agribisnis, penyediaan modal bagi kegiatan/ proses produksi pertanian merupakan hal yang penting karena merupakan rantai yang saling terkait dan sambung menyambung dengan subsistem lainnya. Kecukupan modal melalui bantuan pendanaan dapat berfungsi efektif untuk mencapai tingkat optimal dalam skala usaha pada seluruh subsistem agribisnis. Walaupun bukan satu-satunya faktor produksi usaha pertanian, dalam batas-batas tertentu modal merupakan faktor kritikal. Tidak jarang ditemui bahwa kekurangan modal merupakan kendala yang menghambat petani dalam mengelola dan mengembangkan usahanya.

Tabel. 2.5 Komparasi Capaian Sasaran Renstra OPD Kabupaten Rote Ndao Terhadap Sasaran Renstra OPD Propinsi NTT dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD Kabupaten /Kota	Sasaran pada Renstra OPD Propinsi	Sasaran Pada Renstra K/L
1	Meningkatnya ketrampilan dan wawasan sdm aparatur dan petani	100 %	Meningkatnya jumlah dan mutu SDM peternak, aparatur peternakan dan pengusaha peternakan	Penertiban kebijakan dan SSPK di bidang; perbibitan; budidaya ternak; pakan ternak;pelayanan kesehatan hewan; pelayanan kesmavet, penyuluhan dan pascapanen; serta pelayanan public
2	Meningkatnya pencegahan dan penanggulang penyakit ternak	Tercapainya Pelayanan kesehatan hewan 99 %	Meningkatnya kesehatan ternak dan kesehatan masyarakat veteriner	Terkendali dan tertanggulangnya penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis;
3	Meningkatnya produksi dan prduktifitas ternak	Pembuatan Kebun HMT sistem pagar hidup 79 ha	Meningkatnya jumlah dan mutu ternak	Tercapainya peningkatan produksi pakan ternak dengan Pendayagunaan sumber daya lokal;
4	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak yang Aman, Sehat Utuh dan Halal (ASUH)	Pembangunan TPH 4 unit	Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan asal ternak Aman, Sehat, Utuh, Halal, Asuh	Terjaminnya pangan asal hewan yang ASUH dan pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Peternakan. Berbagai kemajuan yang dicapai oleh Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao. Untuk mengidentifikasi faktor faktor yang mengarah pada isu isu strategis dalam penyusunan rencana strategis pembangunan peternakan di Kabupaten Rote Ndao. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel 3.1

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas peternakan	- Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM)	- Rendahnya sumber daya manusia peternak dan kesehatan hewan
		- Kurangnya Kualitas, Komuditas, Produk Peternakan	-Rendahnya manajemen pemeliharaan peternak
			-Rendahnya bibit dan pakan yang dihasilkan
			-Rendahnya tingkat adopsi Teknologi Tepat Guna (TTG) oleh peternak
			-Rendahnya mutu genetik ternak dan mutu bibit ternak
			-Rendahnya akses permodalan peternak
		- Kurangnya Sarana dan Prasarana Peternakan	-Rendahnya jumlah dan kualitas sarana prasarana dan kesehatan ternak (poskeswan, rumah potong hewan, Laboratorium Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner)
			-Rendahnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana produksi ternak
			-Terbatasnya jumlah kawasan perbibitan
			-Rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak
		- Krangnya Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner	-Rendahnya produk peternakan yang memenuhi standar Kesmavet dan kesejahteraan hewan
			-Tingginya angka kejadian penyakit menular strategis

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah`

Pembangunan di Kabupaten Rote Ndao menuntut perhatian yang lebih, tidak hanya mengalami permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi bagi pertumbuhan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi peternakan, peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan hewan. Dengan mempertimbangkan budaya hidup dalam masyarakat maka visi Pemerintahan Daerah Pada tahun 2019 – 2024 yang hendak dicapai dalam pembangunan jangka panjang.

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai masyarakat yang mandiri, dinamis dan sejahtera maka rumusan visi, merupakan visi yang terkait dengan Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao. Selanjutnya berdasarkan identifikasi pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan (Tabel T-B 35).

Tabel 3.2 Faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan PD terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih		Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2		3	4	5
1	Visi	Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT dan Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan			
2	Misi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ mewujudkan tata ruang wilayah kedalam unit-unit operasional yang tepat dari sisi ekonomi, social budaya dan keamanan Negara ➤ Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta pemerataan pembangunan infrastruktur ➤ Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing ➤ Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan ➤ Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan percepatan penanggulangan kemiskinan ➤ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik yang prima 	kurangnya kualitas pelayanan aparatur kepada masyarakat	kurangnya Sarana dan Prasarana penunangan dan Alokasi dana yang terbatas ketrampilan aparatur yang masih kurang jumlah aparatur yang belum memadai	Aparatur yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugasnya, adanya regulasi yang mendukung pelayanan di bidang peternakan

3	Program	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penataan Ruang ➤ Bebas Isolasi Infrastruktur ➤ Bebas Biaya Pendidikan ➤ Bebas Biaya Kesehatan ➤ Bebas Kemiskinan ➤ Kedaulatan Pangan ➤ Bebas KKN 	rendahnya penciptaan lapangan kerja dibidang agrobisnis peternakan	Dana yang terbatas, SDM peternak yang masih rendah, jiwa kewirausahaan terhadap usaha di bidang peternakan yang masih rendah.	permintaan produk hewan yang meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat
---	---------	--	--	---	---

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

Faktor – factor penghambat ataupun factor factor pendorong dari pelayanan Dinas Peternakan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Peternakan ditinjau dari sasaran jangka panjang menengah Renstra K/L disajikan pada tabel (T – C.24)

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan OPD Peternakan Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya local	Kurangnya sosialisasi, pendistribusian bibit unggul kepada masyarakat, belum adanya pusat pembibitan	Kurangnya Sarana dan Prasarana penunjang dan Alokasi dana yang terbatas	Tersedianya padang penggembalaan yang luas dan program seribu embung oleh pemerintah
2	Tercapainya peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya local	Kurangnya sosialisasi, pendistribusian bibit unggul kepada masyarakat, belum adanya pusat pembibitan	Kurangnya Sarana dan Prasarana penunjang dan Alokasi dana yang terbatas	Tersedianya padang penggembalaan yang luas dan program seribu embung oleh pemerintah
3	Tercapainya peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya	Kurangnya sosialisasi	Kurangnya kesadaran peternak dan Alokasi dana yang terbatas	Tersedianya Lahan

4	Terkendali dan tertanggulangnya penyakit hewan menular strategis dan penyakit Zoonosis	Tingginya kasus penyakit menular karena rendahnya capaian target pelayanan	Kurangnya Sarana dan Prasarana penunjang, Alokasi dana yang terbatas, kurangnya tenaga medis dan paramedis, dan sistem pemeliharaan yang masih ekstensif	Tersedianya regulasi yang mendukung dan Puskesmas di setiap Kecamatan
5	Terjaminnya pangan asal hewan yang ASUH dan pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan	Belum tersedianya Rumah Potong Hewan(RPH) yang memenuhi standart	Alokasi Dana yang terbatas, belum optimalnya penertiban pemotongan di luar RPH	Tersedianya tenaga Keurmaster
6	Terjaminnya dukungan manajemen dan teknis.	Belum optimalnya sosialisasi tentang manajemen usaha peternakan	Kurangnya Sarana dan Prasarana penunjang, Alokasi dana yang terbatas	Tersedianya Lahan Usaha Peternakan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Faktor – factor penghambat dan faktor factor pendorong dari pelayanan Dinas kesehatan ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disajikan pada table T – C.24).

Penentuan Isu – Isu Strategis. Penentuan isu strategis ini terlebih dahulu dilakukan identifikasi isu isu strategis lingkungan eksternal baik yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Peternakan dan Renstra, implikasi Rencana tata ruang wilayah (RTRW) bagi pelayanan , yang menjadi isu strategis Dinas Peternakan yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao seperti disajikan dalam tabel T – C.24).

Tabel 3.4.1. Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Kawasan Pembibitan Ternak	Belum adanya regulasi tentang penetapan kawasan peternakan	Alokasi dana yang terbatas dan kurangnya koordinasi	Tersedianya kawasan peternakan

Tabel 3.4.2. Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Potensi Lahan Hijauan Makanan Ternak	Kurangnya sosialisasi	Alokasi dana yang terbatas	Tersedianya Lahan Hijauan Makanan Ternak

Tabel 3.4.3. Permasalahan Pelayanan OPD Peternakan Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Sasaran Renstra OPD Propinsi NTT beserta Faktor penghambat dan Pendorong Keberhasilan penanganannya

No	Sasaran jangka Menengah Renstra OPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Tercapainya peningkatan Profesionalisme aparatur serta peningkatan kualitas SDM peternak dan pelaku usaha bidang peternakan	Kurang adanya SDM Aparat, petani peternak dan pelaku usaha yang Ahli atau professional dalam mengelola usaha tani ternak maupun usaha pengolahan dan pemasaran ternak/hasil ternak	Kurangnya Sarana dan Prasarana penunjang dan Alokasi dana yang terbatas	Tersedianya Kesempatan untuk mengikuti, bimtek, penyuluhan dan magang untuk peningkatan SDM
2	Tercapainya peningkatan populasi ternak serta produksi ternak dan hasil ternak	Kurangnya sosialisasi, pendistribusian bibit unggul kepada masyarakat, belum adanya pusat pembibitan	Kurangnya Sarana dan Prasarana penunjang dan Alokasi dana yang terbatas	Tersedianya padang penggembalaan yang luas dan program seribu embung oleh pemerintah
3	Tercapainnya pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis	Tingginya kasus penyakit menular karena rendahnya capaian target pelayanan	Kurangnya Sarana dan Prasarana penunjang ,Alokasi dana yang terbatas, kurangnya tenaga medis dan paramedis, dan sistem pemeliharaan yang masih ekstensif	Tersedianya regulasi yang mendukung dan Puskesmas di setiap Kecamatan
4	Tercapainya peningkatan pangan asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Hala (ASUH)	Belum tersedianya Rumah Potong Hewan(RPH) yang memenuhi standart	Alokasi Dana yang terbatas, belum optimalnya penertiban pemotongan di luar RPH	Tersedianya tenaga Keurmaster

3.5 Penentuan Isu Strategis.

Dalam penentuan isu strategis ini terlebih dahulu dilakukan identifikasi isu - isu strategis lingkungan eksternal baik yang mempengaruhi dinamika internasional, dinamika nasional Maupin dinamika regional/ lokal dikaitkan dengan faktor – faktor pelayanan Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Peternakan, sasaran jangka menengah pada Renstra Kabupaten/Kota, Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi pelayanan Dinas Peternakan dan implikasi kajian Lingkungan Hidup Stategis (KLHS) bagi pelayanan Dinas Peternakan sehingga diperoleh informasi tentang apa saja yang menjadi isu strategis Dinas Peternakan yang akan ditangani melalui Renstra pada tahun rencana.

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD Peternakan Kabupaten Rote Ndao dilakukan dengan menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut :

- a. Menentukan skor kriteria-kriteria penentuan isu-isu strategis dengan melihat dari berbagai aspek yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD. Adapun skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis yang dianggap berpengaruh pada permasalahan OPD dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini : **Tabel 3.5.1 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis .**

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar / signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Propinsi/Kabupaten	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan Daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25

- b. Melakukan Penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut pada angka (bobot),

Tabel 3.5.2 Nilai Skala kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria Ke-						Total skor
		1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sitem pemeliharaan bersifat ekstensif	20	5	20	10	5	10	70
2	Skala Usaha ternak relatif kecil dan bersifat sambilan	20	10	15	5	10	20	80
3	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan	20	10	20	10	15	15	90
4	Mutu bibit dan produktifitas ternak cenderung menurun	20	10	20	10	15	25	100

5	Lemahnya koordinasi antar sektor serta belum optimalnya penerapan bidang peternakan	20	10	20	10	15	12	87
6	Kurangnya akses Permodalan	20	10	20	10	15	20	95

- c. Rata-rata skor /bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasi nilai tiap-tiap isu strategis. Isu strategis dimaksud merupakan isu yang teridentifikasi baik isu dari dunia internasional, nasional dan regional. Tabel dibawah ini memuat rata-rata skor isu-isu stratetgis dari skor tertinggi sampai skor terrendah.

Tabel 3.5.3 Rata-rata skor isu-isu strategis

No	Isu-isu Strataegi	Total Skor	Rata-rata Skor
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Mutu bibit dan produktifitas ternak cenderung menurun	100	16.67
2	Kurangnya akses Permodalan	95	15.83
3	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan	90	15.00
4	Lemahnya koordinasi antar sektor serta belum optimalnya penerapan bidang peternakan	87	14.50
5	Skala Usaha ternak relatif kecil dan bersifat sambilan	80	13.33
6	Sistem pemeliharaan bersifat ekstensif	70	11.67

Selanjutnya, dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi OPD dari faktor-faktor eksternal lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : **Tabel 3.5.4 Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)**

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain - lain
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Kebutuhan daging yang tinggi	Kebutuhan daging yang tinggi	Rendahnya pasokan daging yang ASUH untuk kebutuhan masyarakat	
2	penyakit hewan hog colera, belum adanya obat yang efektif menyembuh penyakit Hog colera	penyakit hewan hog colera	masih tingginya angka kematian ternak akibat dari peyakit hog colera	

BAB IV Tujuan dan sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan mempertimbangkan hasil dari faktor-faktor penentu keberhasilan maka disusun tujuan sebagai berikut : Meningkatnya kontribusi pariwisata, pertanian dan perikanan

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke					
(1)	(2)	(3)	(4)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
1	Meningkatnya kontribusi pariwisata, pertanian dan perikanan	Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi peternakan	307.285	317.286	330.928	341.652	352.782	364.336
			Jumlah Populasi ternak Besar	89.452	90.993	96.394	98.036	99.710	101.415
			Jumlah Populasi ternak Kecil	121.531	125.176	132.231	136.197	140.283	144.492
			Jumlah Populasi ternak Unggas	96.302	101.117	102.303	107.418	112.789	118.429

Tabel 4.1

Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke					
(1)	(2)	(3)	(4)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
	Meningkatnya Produksi Peternakan		Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	307.285	3,26	4,30	3,24	3,26	3,28
		Meningkatnya Populasi Ternak	Populasi ternak Besar	89.452	90.993	96.394	98.036	99.710	101.415
			Populasi ternak Kecil	121.531	125.176	132.231	136.197	140.283	144.492
			Populasi ternak Unggas	96.302	101.117	102.303	107.418	112.789	118.429

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan peternakan daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, ditetapkan beberapa strategi yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

- 1. Strategi pengembangan inovasi untuk peningkatan produksi dan produktifitas hasil pertanian, peternakan, dan perikanan.

Strategi utama yang wajib dijalankan pada komoditas yang bernilai ekonomi tinggi untuk meningkatkan produksi dan produktifitas adalah bagaimana caranya agar petani dan peternak mampu menerima manfaat ekonomis yang besar agar lebih bergairah dalam menemukan inovasi inovasi baru agar dapat meningkatkan produksi dan produktifitas. Sebagai penutup pembangunan pertanian juga wajib meningkatkan produksi dan produktifitas. Sebagai penunjang pemerintah Program pembangunan peternakan Kabupaten Rote Ndao diarahkan melalui pola pemberdayaan masyarakat lokal yakni peningkatan produksi pakan hijauan berkualitas, peningkatan mutu genetik, pelayanan kesehatan hewan.

- 2. Kebijakan Pemanfaatan Iptek.

Untuk mengatasi permasalahan yaitu kurang berdayanya masyarakat peternak yang menjadi sasaran kegiatan, rendahnya produktifitas usaha peternakan, dan masih adanya pandangan bahwa peternakan hanya pekerjaan sampingan yang dikerjakan asal asal, maka solusi yang ditawarkan adalah dengan kegiatan yang berbasis iptek.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	:	Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT dan berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan					
Misi II	:	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kontribusi Sektor Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan					
Tujuan		Sasaran		Strategi		Kebijakan	
Tujuan	Meningkatnya kontribusi pariwisata pertanian dan perikanan	Sasaran	Meningkatnya produksi peternakan	Strategi	Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi peternakan	Kebijakan	Pemanfaatan iptek
							Meningkatkan pembibitan dan pengembangan ternak serta pakan ternak

Tabel 5.2

Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	:	Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT dan berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan					
Misi II	:	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kontribusi Sektor Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan					
Tujuan		Sasaran		Strategi		Kebijakan	
Tujuan	Meningkatnya Produksi Peternakan	Sasaran	Meningkatnya Populasi Ternak	Strategi	Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi peternakan	Kebijakan	Pemanfaatan iptek
							Meningkatkan pembibitan dan pengembangan ternak serta pakan ternak

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD yang menjadi tugas PD Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao mencakup empat (4) program utama yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian

6.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6.1.2 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan :

- a. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
- b. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

- c. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
 - Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
- 6.1.3 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 Kegiatan :
 - a. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
 - b. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
- 6.1.4 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 Kegiatan :
 - a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
 - Pembebasan Penyakit Hewan Menular Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kab/kota
 - Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner
 - c. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
 - Pengawasan Peredaran Hewan dan produk hewan
- 6.1.5 Program Perizinan Usaha Pertanian
 - a. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
 - Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan
- 6.1.6 Program Penyuluhan Pertanian
 Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Untuk dapat melihat kesesuaian program dan kegiatan dalam rancangan awal dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Peternakan
Kabupaten Rote Ndao

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp (x 000)	Target	Rp (x 000)	Target	Rp (x 000)	Target	Rp (x 000)	Target	Rp (x 000)	Target	Rp (x 000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tercapainya peningkatan profesionalisme aparatur serta kualitas SDM peternak dan pelaku usaha bidang peternakan	Meningkatnya SDM peternakan (aparatur dan petani)		Program Penunjang Urusan Pemerintah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	914.688	12 bln	1.006.156									12 bln	1.006.156		
			Penyediaan Barang dan Jasa Kantor	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Jasa Kebersihan Kantor, Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan, Instalasi Air, Listrik, Telepon dan LAN, bacaan dan peraturan perundangundangan, Makan dan Minum	141.000	12 bln	155.100									12 bln	155.100		
			Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kendaraan Dinas/Operasional	170.000	2 unit 5 unit	187.000										2 unit 5 unit	187.000	

			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, Jasa Perbaikan	60.000	16 unit 5 unit 2 unit	66.000									16 unit 5 unit 2 unit	66.000		
				Peralatan Kerja Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional															
			Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	70.000	9 Orang	77.000									9 Orang	77.000		
			Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Profil OPD, Renja perangkat daerah, LPPD, LKPJ, LKIP, Evaluasi renja	25.000	6 Dokum en	27.500									6 Dokumen	27.500		
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Tersedianya bimtek peningkatan kapasitas aparatur	28.688	2 Orang	31.556									2 Orang	31.556		
			Koordinasi/Konsultasi dalam dan luar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	420.00	50 Kali	462.000									50 Kali	462.000		
Meningkatkan populasi ternak serta	Meningkatnya populasi dan produktifitas		Program Peningkatan Pembibitan dan Produksi Ternak	Meningkatnya populasi dan produksi ternak	500 ekor	510 Ekor	428.000									510 Ekor	428.000		

produksi ternak dan hasil ternak Meningkatkan populasi ternak serta produksi ternak dan hasil ternak	ternak Meningkatnya populasi dan produktifitas ternak		Inseminasi Ternak	Terlaksananya Pelayanan Inseminasi Buatan, Tersedianya Straw, N2 cair dan pakan ternak babi, Terlaksananya Bimbingan Teknologi Peternakan Tepat Guna (Tenaga IB)	100 ekor	100 ekor 6 orang	100.000									100 ekor 6 orang	100.000		
			Pengadaan Pakan Ternak	Tersedianya pakan ternak		5.300 Kg	55.000									5.300 Kg	55.000		
			Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Tersedianya Bibit Ternak di Masyarakat	310 ekor	310 ekor	165.000									310 ekor	165.000		
			Sensus Ternak	Tersedianya data Populasi ternak yang akurat		8 jenis ternak	75.000									8 jenis ternak	75.000		
			Perbibitan dan Perawatan Ternak	Tersedianya bibit ternak di masyarakat	90 ekor	100 ekor	33.000									100 ekor	33.000		
			Operasi Penertiban, Pemeliharaan dan Pemilikan Ternak	Tersedianya data kepemilikan dan penertiban pemeliharaan ternak															
Meningkatkan pencegahan	Meningkatnya pemberantasan		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	24.000 ekor	24.000 ekor	498.000									24.000 ekor	498.000		

dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis	penyakit hewan menular		Pemeliharaan Kesehatan, Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Ternak	Terlaksananya pemeliharaan, pencegahan dan Pengobatan penyakit menular dan tidak menular ternak, Tersedianya honorarium dokter hewan	24.000 ekor	24.000 ekor 10 dokter	400.000								24.000 ekor 10 dokter	400.000		
			Pembelian dan pendistribusian vaksin ternak	Tersedianya Vaksin dan pelayanan vaksinasi	10.000 dosis	10.000 dosis	90.000								10.000 dosis	90.000		
			Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tersedianya daging yang ASUH		10 Kec	8.000								10 Kec	8.000		
			Pembangunan/ pemeliharaan tempat pemotongan hewan dan rumah potong hewan serta pengadaan sarana prasarana RPH dan TPH	Tersedianya Pembangunan/ Pemeliharaan Tempat Pemotongan Hewan dan Rumah Potong Hewan serta sarana prasarana RPH dan TPH														
			Pemeliharaan Laboratorium Tipe C dan pengadaan sarana prasarana	Terpeliharanya Laboratorium Tipe C dan sarana prasarana														
			Pengadaan alat kedokteran hewan	Tersedianya alat kedokteran hewan														
			Pengawasan perdagangan vaksin dan obat ternak	Tersedianya Pengawasan perdagangan vaksin dan obat ternak														

			Pembangunan dan Pemeliharaan Puskesmas serta pengadaan sarana prasarana	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskesmas dan sarana prasarana														
Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana input produksi, teknologi, pembiayaan, koordinasi, dan kerja sama serta data dan informasi penunjang peternakan	tercapainya peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana input produksi, teknologi, pembiayaan, koordinasi, dan kerja sama serta data dan informasi penunjang peternakan		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan	Cakupan Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan	24 Ha	15 Ha	420.000									15 Ha	420.000	
			Pengembangan Produksi Hijauan Makanan Ternak	Tersedianya Produksi Hijauan Makanan Ternak yang Bermutu	24 Ha	15 Ha	150.000									15 Ha	150.000	
			Pengawetan Pakan	Tersedianya hay dan silase bagi ternak dimusim kemarau	2 klpk	3 klpk	30.000									3 klpk	30.000	
			Pengembangan Konstruksi embung	Tersedianya embung peternakan														

Meningkatkan Peluang Ekonomi Untuk Meningkatkan Pendapatan Peternakan	Meningkatnya Pendapatan Peternak		Program Peningkatan Agribisnis dan penyuluhan peternakan	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Ternak	140.000		500.000									5.200 ekor	500.000	
			Pengembangan agribisnis peternakan	Tersedianya paronisasi sapi		25 ekor	100.000									25 ekor	100.000	
			Pengolahan Hasil Produksi Ternak	Tersedianya Alat Pengolahan hasil Produksi Ternak	2 unit	2 unit	50.000									2 unit	50.000	
			Pengawasan Perdagangan Ternak antar daerah	Meningkatnya pengawasan perdagangan ternak antar daerah		5000 ekor	50.000									5000 ekor	50.000	

			Penyuluhan Penerapan teknologi peternakan tepat guna	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Teknologi Peternakan tepat guna	2 klpk	2 klpk	30.000								2 klpk	30.000		
			Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat	Tersedianya informasi harga komoditi peternakan	20 komoditi	20 komoditi	50.000								20 komoditi	50.000		
			Kontes ternak	Tersedianya ternak unggul di masing-masing kategori	2 kategori	1 kategori	100.000								1 kategori	100.000		
			Pameran Produksi, Industri dan Pangan Lokal Peternakan serta PEDANA/PENAS KTNA	Terpromosinya hasil produk peternakan lokal di tingkat daerah dan nasional	4 Produk	4 Produk	120.000								4 Produk	120.000		

TABLE 10-27
RANCANG PROGRAM KEGIATAN DAN REHABILITASI DINASPISTERHIMPAN
KADUKATON ROTENDANG

[illegible]

Tipe	Sektor	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (subkomponen kegiatan/Output)	Tahun Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan										Unit SKPD Pemerintah Pusat	Lokasi							
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Tahun 2023						
					Target	RP (X.000)	Target	RP (X.000)	Target	RP (X.000)	Target	RP (X.000)	Target	RP (X.000)			Target	RP (X.000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup	01	Program	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat, terutama dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pariwisata	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup	600		600		600		600		600		600		11.540	Lokasi				
						600		600		600		600		600		600							
						600		600		600		600		600		600				600		600	
						600		600		600		600		600		600				600		600	
						600		600		600		600		600		600				600		600	
						600		600		600		600		600		600				600		600	
						600		600		600		600		600		600				600		600	
						600		600		600		600		600		600				600		600	
						600		600		600		600		600		600				600		600	
						600		600		600		600		600		600				600		600	
						600		600		600		600		600		600				600		600	
						600		600		600		600		600		600				600		600	
						600		600		600		600		600		600				600		600	
						600		600		600		600		600		600				600		600	
						600		600		600		600		600		600				600		600	
						600		600		600		600		600		600				600		600	
						600		600		600		600		600		600				600		600	
						600		600		600		600		600		600				600		600	
						600		600		600		600		600		600				600		600	
						600		600		600		600		600		600				600		600	
						600		600		600		600		600		600				600		600	
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600		600		600		600		600									
600		600		600		600																	

[illegible]

BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Indikator yang dijadikan target pencapaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam Tabel 7.1 dibawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal periode Tahun 2019	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produksi Peternakan	Ekor	307.285	317.286	330.928	341.652	352.782	364.336	364.336
□ Jumlah Populasi ternak Besar	Ekor	89.452	90.993	96.394	98.036	99.710	101.415	101.415
□ Jumlah Populasi Ternak Kecil	Ekor	121.531	125.176	132.231	136.197	140.283	144.492	144.492
□ Jumlah Populasi Ternak Unggas	Ekor	96.302	101.117	102.303	107.418	112.789	118.429	118.429

Tabel 7.2 Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal periode Tahun 2019	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Produksi Peternakan	Ekor	307.285	3,26	4,30	3,24	3,26	3,28	3,28
□ Jumlah Populasi ternak Besar	Ekor	89.452	90.993	96.394	98.036	99.710	101.415	101.415
□ Jumlah Populasi Ternak Kecil	Ekor	121.531	125.176	132.231	136.197	140.283	144.492	144.492
□ Jumlah Populasi Ternak Unggas	Ekor	96.302	101.117	102.303	107.418	112.789	118.429	118.429

BAB VIII PENUTUP

Perencanaan strategis atau rencana strategis Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 - 2024 ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD)

Rencana strategis ini disampaikan sebagai acuan bagi Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan program – program dan kegiatan pembangunan khususnya pada subsector peternakan, disamping itu juga merupakan acuan bagi komunitas peternakan dalam rangka memberdayakan masyarakat.

Rencana strategis ini akan dilaksanakan untuk mengantisipasi berbagai aspek, yang diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan pembangunan peternakan maupun berbagai isu strategis yang berkembang baik tingkat nasional maupun pada tingkat propinsi serta kabupaten dan kota

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategis ini akan diuraikan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat anggaran pendapatan dan belanja dan disusun berdasarkan pendapatan kinerja yang akan ditetapkan setiap tahunnya.

Demikian rencana strategis ini disusun sebagai alat manajemen strategis Kepala Dinas Peternakan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi serta tujuan pembangunan subsector peternakan secara efisien dan efektif, namun dilain pihak keberhasilan implementasi rencana strategis ini sangat ditentukan oleh pemahaman dan kreatifitas pihakpihak yang menggunakannya sebagai acuan untuk melaksanakan pembangunan subsector peternakan di Kabupaten Rote Ndao.

Baa, 30 November 2023
Kepala Dinas Peternakan
Kabupaten Rote Ndao,



Hermanus Haning, S.Pt
Pembina Tk I
NIP. 19770720 200003 1 006